

KEMANDIRIAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN PINRANG

Oleh

Haeruddin Saleh¹, Seri Suriani², A. Arwingsyah Kaharuddin³

E-mail; haeruddin@universitasbosowa.ac.id, serisuriani06@gmail.com, andhy91@gmail.com

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa

³Pasca Sarjana Universitas Bosowa

ABSTRAK

Kabupaten Pinrang merupakan daerah otonomi dan diberi hak dalam mengelola potensi sumber-sumber ekonomi sebagai sumber penerimaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan PAD (pendapatan asli daerah) begitu juga dalam bentuk dana bantuan yang diterima dari pusat yang dapat memberi pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Dalam kajian ini digunakan peralatan kuantitatif diskriptif, sedangkan data didapat melalui survey dalam bentuk wawancara dan dokumentasi berbagai informasi yang diperoleh dari instansi mengelola keuangan daerah dan BPS tingkat kabupaten, adapun alat analisis berupa *Microsoft Office Excel* dan *SPSS 23*. Pada penelitian ini memberi gambaran bahwa Pendapatan Asli Daerah ada pengaruh secara positif artinya dengan meningkatnya PAD, terhadap kemandirian keuangan daerah juga mengalami peningkatan, untuk bantuan pendanaan (dana perimbangan) tidak memberi pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, hal ini terjadi karena besarnya dana perimbangan artinya banyak tergantung terhadap bantuan pendanaan dari luar. Sebagai rekomendasi maka pemerintah daerah lebih meningkatkan penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui intensifikasi sumber penerimaan daerah seperti pajak, retribusi dan penerimaan lainnya, sehingga dapat dicapai kemandirian keuangan.

Kata Kunci : Penerimaan Daerah; Bantuan Pendanaan; Investasi; dan Kemampuan Daerah

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan negara Indonesia tentang aturan wilayah biasa diklaim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pada pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 mengungkapkan bagaimana planning tahunan keuangan pemerintah dari daerah berdasarkan penggunaan regulasi yang ada. Kegiatan urusan pemerintahan sebagai wewenang daerah, didanai atas dasar aturan penerimaan dan pengeluaran dari daerah, selain itu pelaksanaan urusan dari pemerintahan sebagai merupakan tanggungjawab daerah.

Peraturan pemerintah pasar 4 No. 105 tahun 2000 telah ditegaskan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah wajib dilakukan secara teratur, transparan, efektif dan efisien yang berdasarkan perundang-undangan yang

berkeadilan dan menjunjung asas kepatuhan. Menurut Jalaluddin (2012), Keuangan yang dikelola dengan baik dengan menggunakan peraturan yang telah ada, sehingga daerah dapat meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan pengelolaan daerah.

Kemandirian keuangan daerah bisa ditinjau seberapa besar Pendapatan Asli daerah (PAD) dibandingkan menggunakan transfer yang diterima dan bersumber dari pusat. Penerimaan PAD adalah komponen pokok pada pengukuran mandiri keuangan daerah, hal ini berdasarkan pendapat Halim (2007). Sumber-sumber berupa pajak daerah, output retribusi daerah, output pemanfaatan kekayaan yang ada di daerah terpisah, dan penerimaan lainnya adalah pendapatan asli daerah yang sah. Dengan pengelolaan sumber-sumber penerimaan secara efektif dan transparan mampu menaikkan PAD sehingga

dapat memberi pengaruh terhadap pencapaian mandiri. Hal ini dapat tercapai apabila diusahakan mengurangi ketergantungan dari pusat dalam hal penerimaan dana dikurangi.

Keuangan dapat dilakukan suatu analisis dengan cara penggunaan rasio yaitu membandingkan penerimaan daerah dengan dana dari luar. Perhitungan rasio banyak digunakan dalam lingkup perusahaan yang bersifat komersil. Namun dalam pemerintah telah digunakan walaupun masih terbatas, hal ini karena belum adanya kejelasan penggunaan metode tersebut untuk mengetahui rasio penerimaan daerah. Kabupaten Pinrang menjadi daerah otonom pada Provinsi Sulawesi Selatan dibutuhkan kemandirian dalam membangun pemerintahannya, pengelolaan pemerintahan yang baik menjadikan daerah semakin maju dan berkembang dan inilah yang diharapkan yaitu bagaimana mengelola potensi dan sumber penerimaan dan tidak tergantung pada bantuan dari pusat. Sumber penerimaan dapat dioptimalkan apabila sumber daya dikelola dalam bentuk mendorong investasi, sehingga meningkat sumber-sumber penerimaan keuangan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah sebagai akibat dari meningkatnya investasi dalam berbagai kegiatan ekonomi di daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Haeruddin Saleh dkk 2020)

Kabupaten Pinrang dalam hal kemandirian keuangan masih sangat tertantung terhadap bantuan pusat, artinya kemandiriannya masih rendah, penerimaan Pemerintah kabupaten Pinrang, hanya 11,47% yang bersumber dari PAD selebihnya adalah penerimaan berdasarkan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yakni sebanyak 88,53%, hal tersebut memperlihatkan bahwa Pemda masih sangat bergantung dalam

Pemerintah Pusat dalam mendukung pendanaan pembangunan. Bantuan dana sebagai bentuk perimbangan diberikan dari pemerintah pusat juga penerimaan pendapatan daerah dibutuhkan mampu menaruh pengaruh terhadap peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebagai akibatnya berimplikasi juga terhadap peningkatan efektifitas kemandirian Daerah Kabupaten Pinrang. Berdasarkan kenyataan tersebut tersebut, peneliti merasa tertarik dengan tujuan penelitian ini (1) mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah, (2) mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kemandirian keuangan daerah, (3) mengetahui pengaruh perimbangan pendanaan dan Pendapatan Asli Daerah secara menyeluruh terhadap mandirinya pengelolaan keuangan yang ada daerah.

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan pasal 156 ayat 1 dari Undang-Undang No. 32 tahun 2004 berisi tentang dasar pengertian dari keuangan suatu daerah, dalam pemerintahan daerah pada pengelolaan keuangan mencakup berbagai hak beserta kewajiban yang monitoring yaitu penggunaan uang dan semua kegiatan dalam pemanfaatan uang dan modal yang menjadi asset daerah dan berafiliasi dengan kegiatan penggunaan hak dan kewajiban tersebut. Tujuan utama daripada aturan yang dibuat bukan hanya kemauan untuk melaksanakan kewenangan dan keuangan pemerintah daerah yang bersumber dari pemerintah pusat namun hal yang lebih urgen yaitu keinginan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang efisien serta efektif, pemanfaatan berbagai sumber penerimaan daerah selanjutnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan juga kesejahteraan bagi rakyat sehingga tidak terjadi kesenjangan terhadap kesejahteraan selain itu untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan desentralisasi, transparansi, dan

akuntabilitas menjadikan lebih mayoritas sehingga mendukung pelaksanaan kegiatan operasional pemerintah secara umum dan secara khusus adalah proses pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah merupakan bentuk hak dan kewajiban suatu wilayah didalam kerangka pemerintahan daerah dengan nilai dalam bentuk uang, termasuk semua macam asset yang terkait mengenai kepentingan dan kewajiban dari daerah, didalam struktur anggaran penerimaan dan belanja daerah. (Afarahim 2013). Artinya hak merupakan kemampuan dalam mengelola sumber-sumber penerimaan daerah secara optimal, sumber-sumber ini berupa tagihan dari masyarakat karena memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah sehingga wajib membayar dalam bentuk retribusi, selain itu masyarakat juga wajib membayar kewajiban sebagai warga negara berupa pajak yang sifatnya memaksa karena berada dalam satu wilayah yang kena pajak yang ditentukan secara aturan. Penerimaan lain yang diterima oleh pemerintah adalah dalam bentuk bantuan baik dari tingkat propinsi maupun tingkat pusat terdiri dari dana alokasi sifatnya umum beserta dana khusus sifatnya berdasarkan ketentuan dari pemerintah. Adapun mengenai kewajiban bagaimana pemerintah daerah menggunakan uang untuk biaya tagihan dari daerah dalam kaitannya dengan fungsi dan tugas pemerintah, pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan mengembangkan pembangunan perekonomian untuk kemakmuran.

2. Bantuan Dana Perimbangan

Suatu daerah masih membutuhkan bantuan dalam bentuk dana perimbangan adalah bentuk penerimaan daerah yang ada dalam APBN guna membantu dari kegiatan pemerintah daerah didalam pencapaian

sasaran pelaksanaan otonomi yang diberikan untuk daerah, yaitu dari segi pemberian layanan dan dapat ditingkatkan dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Tuasikal A. 2008). Dalam penerimaan bantuan dana dibagi menjadi :

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Sumber pendapatan dalam bentuk pajak bersama terdiri dari pasal 21 (PPh) pajak penghasilan dan pasal 25/29 untuk individu, pajak tanah dan bangunan (PBB), serta bagian tentang perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Sumber yang dikongsi adalah pendapatan yang berasal dari penguasaan sumber daya alam di suatu kawasan berupa produk perikanan, produk perlombongan minyak dan gas, produk perhutanan dan sumber semula jadi yang lain.

b. Dana Alokasi Khusus (DAU)

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 telah dijelaskan hak dan kewajiban dari suatu daerah dalam mengelolah keuangannya, yang paling pokok mengenai perimbangan dari keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, dan didalamnya diterangkan mengenai modal peruntukan umum, apa yang dimaksudkan berupa dana peruntukan umum adalah dana yang berasal dari APBN yang diperuntukkan berbagai harapan adanya distribusi kemampuan kewenangan yang sama di antara daerah. sehingga daerah tidak terlihat ada kesenjangan yang menjolok antar daerah yang dapat mengakibatkan kecemburuan daerah yang dapat menyebabkan kesenjangan social, dan untuk membiayai segala kebutuhan pengeluaran dengan tujuan pelaksanaan desentralisasi. Penentuan besaran DAU diatur dalam pasal 7 UU No. 33 tahun 2004 yaitu 25% dari pendapatan didalam negeri berdasarkan ketentuan APBN. Untuk tingkat propinsi dan daerah

kabupaten/kota ditentukan besaran DAUnya sebesar 10%.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Anggaran digunakan sebagai alat perencanaan, sebagai metode perancangan, anggaran yang ada dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dan objektif dasar berdasarkan dengan visi dan misi ditentukan. Pelbagai rencana kegiatan dan aktivitas kerja guna pencapaian sasaran organisasi dilakukan dengan merancang sumber pendanaan alternatif, dan memperuntukkan dana dalam berbagai sektor kegiatan yang telah disiapkan, dan menentukan petunjuk prestasi dan tahap pencapaian strategik yang direncanakan. Dana alokasi khusus (DAU) diatur dalam UU No 33 Tahun 2004 merupakan dana dengan sumber APBN dan pengalokasiannya kepada daerah dengan tujuan dalam hal pelaksanaan pembangunan yaitu menjadi pembiayaan pembangunan dalam hal ini adalah kebutuhan yang sifatnya khusus, sebagai contoh adalah dana bantuan social, dana reboisasi dan bantuan lainnya (Cahyang, E, Saleh H, Rafiuddin 2017)

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Anggaran secara umum dapat didefinisikan sebagai rencana kegiatan keuangan yang dikelola secara bijaksana untuk masa tertentu dan di waktu akan datang. Komite Nasional Pemerintahan Akuntansi Amerika Serikat (Laming, R.F. dkk 2019) menyatakan anggaran sebagai keuangan rencana berisi perkiraan pengeluaran yang diusulkan. Sedangkan Bahtiar, dkk (2002) didefinisikan, anggaran adalah catatan rancangan waktu yang lalu dan masa depan, dan mekanisme mereka peruntukan sumber, kaedah perkembangan, cara menyalurkan, penerimaan, cara perundingan, pendapat organisasi, model

pengendalian, dan sarana atau hubungan komunikasi. Didalam otonomi suatu daerah, kebebasan daerah sangat diharapkan didalam pembiayaan kegiatan pembangunan daerah dan layanan kepada masyarakat. Pemerintah dapat melakukan tagihan dalam berbagai cara penerimaan pajak, pungutan, hasil dari pemanfaatan aset daerah yang terpisah dan PAD hukum lainnya diatur dalam undang-undang.

Pendapatan secara langsung didapat dari pengelolaan pajak daerah dan pajak lainnya yang dikenakan ke publik. Keadilan dalam pajak berkaitan pada prinsip ekuitas secara horizontal dan vertikal. Prinsip secara horizontal mewajibkan semua masyarakat untuk membayar pajak. Sedangkan prinsip secara vertikal berdasarkan pada konsep wajib pajak atau pembayaran retribusi, yang artinya untuk masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membayar dikenakan pajak atau retribusi yang tinggi. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi fiskal yang menyediakan sumber daya pendapatan untuk daerah yang dapat eksplorasi dan digunakan untuk potensial daerah itu sendiri (Gade, 1993).

PAD merupakan bagian penerimaan pendapatan yang mesti terus meningkat. (Andrian R.N.R & Wahid 2018). Komponen yang berkaitan dengannya mesti ditindaklanjuti untuk berjaya. Contohnya, dengan memberikan penambahbaikan terhadap kemudahan dan perkhidmatan awam untuk komuniti agar masyarakat dapat memanfaatkannya. Menurut Yani, A. (2004), PAD adalah seluruh pendapatan daerah berasal dari ekonomi wilayah asal. Pengenal pastian sumber pendapatan tempatan adalah untuk meneliti, menentukan dan menentukan sumber pendapatan mana yang sebenarnya merupakan sumber pendapatan tempatan

dengan meneliti dan mengolah serta menguruskan sumber pendapatan ini dengan betul sehingga dapat hasil yang maksimum.

4. Kemandirian Keuangan Daerah

Anggaran sektor umum adalah instrumen kebertanggungjawaban untuk mengurus dana publik dan melaksanakan program yang didanai oleh publik, dengan aspek yang harus dimasukkan dalam anggaran sektor publik. Aspek-aspek yang diliputi dalam anggaran umum adalah perancangan, kawalan dan pertanggungjawaban. Di sektor swasta, belanja adalah sebahagian daripada rahsia kelompok yang ditutup untuk umum, tetapi belanja sektor umum mesti dibuat umum untuk mengkritik, membincangkan, dan memberikan input.

Keuangan daerah ditafsirkan sebagai semua yang meliputi hak dan kewajiban yang bernilai dalam bentuk mater, serta segala bentuk pendanaan atau barang yang dapat digunakan sebagai aset daerah asalkan tidak dimiliki/dikendalikan oleh negara atau daerah yang lebih tinggi dan pihak lain sesuai dengan ketentuan/undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kebebasan keuangan daerah adalah suatu kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan, pengembangan dan pelayanan pemerintah terhadap orang-orang yang telah melaksanakan kewajiban pajak dan biaya pengguna dan sumber yang dibutuhkan oleh wilayah tersebut (Susbiyani, A. 2017). Menurut Wangi, C. A. P. dan I. T. R. (2010). Penunjuk kebebasan keuangan daerah ini diukur dengan menggunakan berbagai pendapatan tempatan dibahagikan dengan jumlah pendapatan wilayah. Mengetahui kebebasan keuangan ini menunjukkan seberapa besar kekuatan pajak daerah, dan seberapa besar kemampuan PAD untuk membiayai perbelanjaan daerah yang

dianggarkan untuk menyediakan sarana umum kepada masyarakat.

B. METODOLOGI

1. Jenis Penelitian

Dasar penelitian mengenai eksplanatori adalah penelitian dengan tujuan untuk pembuktian hipotesis, yang pada dasarnya merupakan penelitan yang menerangkan permasalahan dalam bentuk hubungan antara pemboleh ubah. Penyelidikan ini mempunyai tahap yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kajian deskriptif dan perbandingan.

2. Populasi dan Sampel

Berkaitan mengenai masalah analisis penelitian pada lokasi penelitian di Pemerintah Kabupaten Pinrang ditentukan teknik persampelan yang dipakai adalah pengambilan sampel secara keseluruhan, yaitu metode pengambilan sampel ketika data populasi digunakan sebagai sampel. Kajian ini menggunakan sampel data sekunder dari laporan realisasi anggaran yang dipetik dari laporan pertanggungjawaban prestasi pemerintah Daerah Pinrang untuk Tahun Anggaran 2013-2019 yang diperoleh dari laman web rasmi Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang (Kabupaten Pinrang dalam angka 2020).

3. Metode Pengolahan Data

Data yang digunakan adalah data mengenai jumlah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pinrang, data mengenai jumlah dana seimbang dan data tentang kebebasan keuangan yang diperoleh dalam bentuk data selama 7 tahun. Untuk memudahkan pemrosesan data, dalam mengolahnya digunakan metode analisis *Microsoft Office Excel 2010* dan *SPSS 23*. Menguji hipotesis kajian ini menggunakan Analisis Regresi Moderasi (MRA) atau ujian interaksi dengan menggunakan persamaan regresi yang terdiri

dari unsur interaksi antara variabel sehingga dapat diketahui pengaruhnya, adapun persamaan regresi:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Sebagai keterangan yaitu Y adalah Kemandirian Keuangan Daerah, b_0 adalah konstanta, b_1 adalah koefisien dari PAD, b_2 adalah koefisien dari Dana Perimbangan, X_1 adalah PAD, X_2 adalah Dana Perimbangan, e adalah error.

a. Pengujian secara simultan (Uji-F)

Pengujian ini adalah untuk mengetahui pengaruh serentak dari keseluruhan variabel menjadi obyek dalam penelitian ini

1). Adapun pengujiannya

$H_0 : b_1 = b_2 = 0$, artinya Dana Perimbangan dan PAD terhadap kemandirian keuangan tidak ada pengaruhnya.

$H_a : b_1 \neq b_2 \neq 0$, artinya Dana Perimbangan dan PAD secara simultan tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

2) Dasar penentuan kesimpulan

H_0 diterima dan H_0 ditolak apabila probabilitas $< 0,05$

H_0 ditolak dan H_0 diterima apabila probabilitas $> 0,05$

b. Pengujian secara parsial (Uji-t)

Pengujian dengan statistik sebagai pengujian signifikan individual. Artinya untuk mengetahui nilai independent terhadap nilai dependent yang terdiri atas variabel dana perimbangan dan PAD terhadap kemandirian keuangan daerah.

1) Pengujiannya berbentuk

$H_0 : b_1, b_2 = 0$, artinya Dana Perimbangan dan PAD terhadap kemandirian keuangan daerah secara simultan tidak berpengaruh.

$H_a : b_1, b_2 \neq 0$, artinya Dana Perimbangan dan PAD secara simultan

tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

2) Kriteria penentuan kesimpulan

H_0 ditolak apabila probabilitas $< 0,05$

H_0 dan H_a diterima apabila probabilitas $> 0,05$

c. Uji Nilai determinasi (R^2)

Menguji variabel penentuan (R^2) dipakai sebagai pengukur koefisiensi detereminasi sehingga diketahui besarnya prosesntase korelasi antar varaibel. Nilai (R^2) penentuan nilainya berkisar 0 hingga 1 ($0 = R^2 = 1$). Nilai (R^2) dapay dinyatakan baik apabila nilainya di atas 0.5 kerana nilai (R^2) berada antara 0 hingga 1. Nilai (R^2) = 0 menunjukkan bahawa tidak ada pengaruh.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pekermbangan Pendapatan Asli Daerah

Suatu daerah dikatakan maju salah satu indikatornya adalah dlam hal pengelolaan keuangan, hal ini penting sekali diketahui karena merupakan sumber pembiayaan pembangunan berupa penerimaan dalam bentuk PAD (Pendapatan Asli Daerah). Kabupaten Pinrang dalam pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerahnya setiap tahun menunjukkan peningkatan dapat digambarkan perkemabngannya pada tabel 1 yaitu dari tahun 2013 sampai tahun 2019 sebagai tahun obyek penelitian memperlihatkan perkembangan yang sangat besar, dengan penerimaan yang paling besar di dapat dari pajak daerah kemudian disusul penerimaan lainnya dan yang berada pada titik rendah adalah nilai dari pemanfaatan kekayaan dari daerah yang terpisah. Data-data mengenai penerimaan daerah untuk melihat perkembangannya dengan melihat tingkat kemakmuran penerimaan. Adapun metode perhitungan tingkat kemakmuran penerimaan digunakan system logaritma natural, pada tabel

1 diperlihatkan mengenai perkembangan penerimaan keuangan. Dengan meningkatnya penerimaan PAD mengindikasikan daerah tersebut mengelola sumber-sumber penerimaan secara baik dan diharapkan penerimaan dapat dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan. (Hutasoit, R. K. M. 2017), dapat dilihat pada table 1 (*terlampir*)

Penerimaan PAD kabupaten Pinrang dari tabel 1, menunjukkan bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan pada tahun 2013 besarnya penerimaan dari PAD mencapai Rp. 52,047.346.000 nilai tingkat kemakmurannya sebesar 24.68 selama tujuh tahun yaitu tahun 2019 besarnya PAD yang diterima mencapai Rp. 133,311,000,000 dengan tingkat kemakmuran mencapai 26.62 dari data-data yang ada dapat diketahui rata-rata tingkat kemakmuran sebesar 25.34, Kabupaten Pinrang mulai tahun 2016 kemakmuran dari penerimaan PAD meningkat atau diatas dari nilai rata-rata, dengan demikian apabila dapat dipertahankan atau ditingkat peluang sangat besar menjadikan daerah ini menjadi daerah yang dapat mandiri dari segi pengelolaan keuangan. Dengan kemandirian dalam hal keuangan daerah maka kabupaten Pinrang akan semakin maju dibandingkan daerah lain di Sulawesi Selatan.

2. Perkembangan Dana Perimbangan

Bantuan dari pusat berupa dana perimbangan bersumber dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Dana perimbangan kabupaten Pinrang setiap tahun jumlahnya cukup besar, apabila disandingkan dengan penerimaan pendapatan asli daerah sangat jauh lebih besar. Dana ini sangat membantu bagi daerah untuk melaksanakan pembangunan dalam berbagai sektor untuk kesejahteraan masyarakat, mengenai perkembangan dana perimbangan yang

diterima oleh pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan sehingga perlu suatu strategi bagaimana cara untuk mengurangi dana perimbangan dan sebaliknya dana Pendapatan Asli Daerah lebih besar penerimaannya, dengan demikian yang perlu tindakan berbagai cara yaitu mengefektifkan penerimaan dan menggali sumber-sumber yang belum dikelola oleh pemerintah daerah seperti penerimaan dari sektor pariwisata, sektor pertambangan dan sektor lainnya, dapat dilihat pada table 2 (*terlampir*)

Besarnya dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Pinrang walaupun besar namun ada kecenderungan jumlahnya kenaikannya tidak tetap artinya jumlahnya berfluktuasi dari tahun ke tahun, sebaliknya pendapatan asli daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan, seperti pada tabel 2 dengan jelas memberikan gambaran daerah ini telah berusaha meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Sedangkan secara rasio juga diperlihatkan bahwa setiap tahunnya mengalami penurunan, ini juga memberikan gambaran ketergantungan dengan pusat dan provinsi mengalami penurunan. Dana perimbangan tersebut adalah bantuan dari pemerintah yang bersumber dana pemerintah pusat/provinsi ditujukan kepada pemerintah daerah yang didapat dari pendapatan APBN, dan didistribusi dengan harapan ada pemerataan dari segi kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan dari pada desentralisasi.

3. Kemandirian Keuangan Daerah

Keuangan yang mandiri bagi wilayah atau daerah diketahui yaitu dengan melihat besarnya rasio (Sudika, I. K., & Budiarta, I. K. 2017). Untuk mengetahui besarnya rasio kemandirian suatu daerah dalam hal pengelolaan keuangan diukur melalui metode

membandingkan antara jumlah dari pendapatan asli daerah dibandingkan dengan penerimaan dari bantuan dari pusat, provinsi dan penerimaan lain berupa beban dikali 100 persen. Adapun hasil perbandingan atau rasio kemandirian keuangan yang diperoleh pemerintah daerah kabupaten Pinrang dari tahun 2013 sampai tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3, dan rasionya dari tahun ke tahun bervariasi dan jumlah dana perimbangan masih sangat besar melebihi penerimaan pendapatan asli. Dari olahan data didapat kesimpulan mengenai besaran nilai kemandirian yang tinggi ada pada tahun 2019 dengan nilai sebesar 13,72% sedangkan besaran angka kemandirian paling rendah dicapai tahun 2013 dengan besaran 7,81%. Jika dijumlah rata-rata pada tataran kemandirian dari keuangan suatu daerah yaitu Kabupaten Pinrang selama tujuh tahun maka diperoleh hasil sebesar 11,93%, dapat dilihat pada table 3 (*terlampir*)

Hasil Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Data hasil penelitian dilakukan analisis statistic untuk memberikan gambaran tingkat keakuratan dari data, pada analisis data berjumlah tujuh tahun sebagai sampel, data tersebut berupa data sekunder yaitu mengenai jumlah besarnya Pendapatan Asli Daerah yang diterima daerah selama 7 tahun begitu juga mengenai data Dana Perimbangan dan juga data kemandirian, kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga diperoleh rata-rata dan standar deviasinya. Untuk lebih jelasnya mengenai data yang akan dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap kemandirian keuangan dapat dilihat pada table 4 (*terlampir*)

Dalam tabel 4, memperlihatkan mengenai jumlah data pada penelitian ini yaitu berjumlah 7 sampel (N) sebagai obyek penelitian. Berdasarkan hasil hitungan statistic dengan menggunakan periode

2013 sampai 2019, variabel independent yang dipakai pada penelitian tersebut antara lain Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2), adapun variabel dependent dari penelitian tersebut mencakup Kemandirian Keuangan Daerah (Y). Dari 7 data Pendapatan Asli Daerah, nilai rendah (minimum) dengan nilai 24.68 dan tertinggi (maximum) dengan nilai 25.62. Adapun rata-rata (mean) dengan nilai diperoleh 25.34 standar deviasi yang didapat adalah 0,322254. Dari 7 data Dana Perimbangan, sebagai gambaran yang terendah (minimum) sebesar 37.49 dan tertinggi (maximum) nilainya mencapai 77.84. Besarnya rata-rata (mean) mencapai 63.81 dan deviasi standar 18.09110. Mengenai Kemandirian Keuangan dengan 7 data mendapatkan terendah (minimum) dengan nilai adalah 7.781 dan tertinggi (maximum) mendapatkan nilai 13.72. Nilai rata-rata (mean) sebesar 11.92 dan deviasi standar 2.12905.

2. Uji Statistik

Hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS penulis menyusun rangkuman hasil regresi pada table 5 (*terlampir*)

Pada tabel 5, menunjukkan hasil atau nilai koefisien didapat nilai sehingga persamaan regresi yaitu : $Y = -126.538 + 5.494 \text{ PAD} - 0.012 \text{ DP}$, adapun penjelasan dengan persamaan regresi linear tersebut yaitu:

- a. Nilai -126.538 menunjukkan besarnya konstanta, berarti besaran variabel independent berupa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan nilai sebesar 0, makna yang didapat besarnya nilai keuangan mandiri yaitu -126.538.
- b. Besarnya angka koefisien dari regresi berupa variabel Pendapatan Asli Daerah adalah memberi pengaruh dengan nilai

5.494, artinya bahwa setiap perubahan yaitu naiknya penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 % dengan catatan variabel lainnya tetap, dengan demikian kemandirian keuangan daerah dapat meningkat sebesar 5.494.

- c. Nilai sebesar 0.012 pada koefisien regresi mengenai dana perimbangan yang bernilai negative, artinya apabila ada kenaikan Dana Perimbangan dengan nilai 1 % akan ada pengaruh yaitu penurunan kemandirian keuangan Daerah sebesar 0.012 dengan dasar bahwa variabel lain dalam keadaan tetap, maka dari itu diharapkan nilai dana perimbangan menurun untuk dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam hal keuangan.

Pembuktian melalui Uji-F tujuannya adalah menentukan apakah ada dampak secara bersama antara komponen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Seimbang melalui serentak ada pengaruh bagi Kemandirian Keuangan Daerah. Selanjutnya adalah output SPSS pada uji-F. Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa hasil analisis regresi dengan nilai F-hitung 7,413 dengan tahap signifikan 0,045, sedangkan nilai F-table adalah 4,740. Oleh itu, dapat disimpulkan bahwa nilai F-hitung $>$ F-table ($7,413 > 4,740$) dimaknai bahwa secara keseluruhan Pendapatan asli daerah dan Perimbangan dana Kabupaten Pinrang bersama-sama (secara serentak) memberi pengaruh secara signifikan untuk kemandirian Keuangan Daerah. Adapun T-hitung dijalankan untuk mengetahui pengaruh secara parsial, berikut adalah hasil keluaran SPSS untuk uji-T.

Berdasarkan data yang ditunjukkan dalam tabel 5, hasil pengujian untuk parameter individu (Uji Statistik) adalah seperti berikut:

- a. Pengaruh Pendapatan asli daerah bagi Kemandirian keuangan daerah didasarkan kepentingan, apabila kepentingan $< 0,05$ berarti H_0 diterima, dan jika kepentingan $> 0,05$ berarti H_0 ditolak. Didapat dari hasil dalam tabel 5, dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai Sig. 0.036 dan t-hitung 3.111. Oleh kerana kepentingan uji-T kurang dari 0,05 ($0,036 < 0,05$) dan t-hitung $>$ t-jadual ($3,111 > 1,1895$), H_0 diterima. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa Pendapatan Asli Daerah sebagian memberikan pengaruh yang positif bagi Kemandirian Keuangan Daerah.
- b. Dana melalui perimbangan untuk kemandirian keuangan daerah didasarkan kepentingan, jika kepentingan $< 0,05$ diartikan H_0 diterima, jika kepentingan $> 0,05$ maka H_0 ditolak. Dilihat dari hasil dalam tabel 5, dapat dilihat bahwa dana perimbangan mempunyai nilai Sig. 0.727 dan kiraan -0.375. Oleh kerana kepentingan uji-T kurang dari 0,05 ($0,727 > 0,05$) dan nilai t-hitung $<$ t-table ($-0,375 < 1,1895$), maka H_0 ditolak atau tidak signifikan. Olehnya itu, sebagai kesimpulan bahawa dana perimbangan mempunyai kesan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Dampak Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Didasarkan pengolahan data dengan program yang telah dilakukan dan analisis, sebagai jawaban dari permasalahan pertama diperoleh bahwa, pendapatan asli daerah memberi berpengaruh yang positif bagi kemandirian keuangan daerah di kabupaten Pinrang tahun 2013 -2019 hal ini ditunjukkan

pada analisis statistic. Hasil ini menggambarkan bahwa apabila pendapatan asli daerah semakin tinggi maka kemandirian keuangan juga mengalami peningkatan, begitu pula sebaliknya apabila pendapatan asli daerah semakin rendah maka kemandirian keuangan daerah juga mengalami perubahan yang rendah (Setiawan, A. 2010).

Salah satu sumber penerimaan berupa pendapatan asli daerah bagi daerah yang harus didorong pertumbuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian sejalan dengan hasil pengolahan data mengenai analisis Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dari tahun 2013 hingga tahun 2019. Kegiatan selama tujuh tahun tersebut, jumlah Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Pinrang telah berusaha meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah guna meningkatkan kemandirian keuangannya sebagai daerah otonomi.

Ukuran tingkat kemakmuran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang dapat dilihat dari rata-rata yang diperoleh selama tujuh tahun sebesar 25,34 yang memberi gambaran mengenai tingkat kemakmuran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang masih belum memberi kontribusi yang begitu tinggi, serta tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang selama tujuh periode mencapai 11,93% yang dimaknai sebagai partisipatif atau sedang, adanya keselarasan yang ditunjukkan sehingga pengaruh positif dari Pendapatan Asli Daerah terhadap kemandirian keuangan daerah serta mengutkan adanya indikasi yaitu apabila tinggi jumlah Pendapatan Asli Daerah yang didapat atau ukuran kemakmuran Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Kabupaten Pinrang, kemandirian keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang yang tinggi memberi pengaruh. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh, Kustianingsih, Muslimin dan Kahar (2018), dan penelitian yang dilakukan oleh Lestari, Dali, dan Abdullah (2016), di mana keempat penelitian tersebut menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

2. Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Sesuai pengujian pada analisis statistik yang dilaksanakan penulis mempunyai sasaran adalah mengetahui dampak dari pemboleh ubah bebas dan bersandar, ia menyatakan bahawa Dana Imbangan tidak mempunyai kesan dengan mempunyai t-hitungan -0.375 dengan signifikan tahap 0.727 yang lebih besar daripada $0,05$, sementara t-table mempunyai nilai $1,895$. Dalam kajian ini, dapat dilihat bahawa dana pengimbangan tidak mempengaruhi kemandirian keuangan Kabupaten Pinrang. Ini dapat menunjukkan bahawa jika dana meningkat, kemandirian keuangan wilayah akan menurun. Sebaliknya sekiranya dana pengimbangan telah menurun, tahap kebebasan keuangan wilayah akan meningkat.

Hasil kajian ini sejajar dari hasil pemrosesan data hubungan analisis Dana perimbangan Pemerintah Daerah Pinrang mulai periode 2013 hingga 2019, mengenai kebebasan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dari periode 2013 hingga 2019. Selama tujuh tahun, tingkatan ketergantungan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang diklasifikasikan sebagai berfluktuasi dengan rata-rata 63.81% yang masih dianggap tinggi sekali. Tetapi secara keseluruhan ia terus menurun. Fenomena ini sejajar dengan peningkatan tahap kemandirian

keuangan Pemerintah Daerah Pinrang selama tujuh tahun dengan rata-rata 11.93.65% yang corak hubungannya masih dianggap partisipatif dengan kemampuan keuangan yang sederhana atau tidak begitu tinggi. Ini menunjukkan bahawa Pemerintah Kabupaten Pinrang masih terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi walaupun Pemerintah Kabupaten Pinrang telah berusaha meningkatkan kemampuan dan kebebasan keuangannya dalam membiayai pembangunan wilayahnya selama enam tahun berturut-turut. Ini selaras dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Santoso (2018), dan Anas (2018) di mana keempat kajian tersebut menyatakan bahawa dana perimbangan memberi kesan negatif terhadap tahap kemandirian keuangan daerah.

Keuangan yang mandiri dalam suatu daerah seperti kabupaten Pinrang tidak tergantung dari pusat sangat diharapkan sehingga daerah betul-betul otonomi dalam pelaksanaan pembangunan yang berujung pada peningkatan dari kesejahteraan masyarakat. Sehingga peningkatan kemandirian perlu ada berbagai kebijakan yang dapat dilakukan suatu pemerintah seperti kemudahan bagi investor untuk melakukan usaha sehingga dapat mendorong peningkatan penerimaan daerah melalui pajak dan juga pemberian insentif bagi pengusaha sehingga terdorong untuk lebih banyak berperan dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang tersedia dan nantinya berkontribusi terhadap pemerintah dalam bentuk pemberian pajak dari usahanya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dijelaskan pada tulisan sebelumnya maka didapat dibuat suatu simpulan yaitu

Pendapatan Asli Kabupaten (PAD) kabupaten Pinrang memberikan gambaran dan dindikasikan ada peningkatan yang signifikan setipa tahunnya, hal ini menunjukkan potensi kabupaten Pinrang dalam hal pengelolaan keuangan dan sumbernya dari Pendapatan Asli Daerah cukup besar, namun perlu dikelola lebih maksimal sumber-sumber penerimaan tersebut, walaupun berpengaruh terhadap kemandirian keuangan namun belum dapat mengimbangi besarnya dana perimbangan yang bersumber dari propinsi, dari pusat dan dari sumber lainnya. Hal ini juga daerah kabupaten Pinrang perlu meningkatkan kemampuannya sumber daya alam sebagai sumber penerimaan melalui peningkatan investasi, Dengan perkembangan penanaman modal maka sektor ekonomi di daerah ini akan semakin berkembang sehingga dapat memberi kontribusi dari pungutan pajak pengelolaan sumber daya alam, penerimaan retribusi dari sarana yang ada dan pendapatan dari laba perusahaan yang ada di daerah kabupaten Pinrang.

Bantuan dana berupa dana perimbangan bersumber dari dana bagi hasil yaitu dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), yang diterima oleh daerah Kabupaten Pinrang cukup besar jika dibandingkan dengan Penerimaan Asli Daerah, dengan demikian mengenai kemandirian dalam hal keuangan daerah belum dapat dicapai. Walaupun dana perimbangan sangat diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan daerah dalam berbagai sektor, tetapi sekiranya dana penerimaan Pendapatan Asli daerah Besar maka kabupaten Pinrang akan menjadi daerah yang sejatera dan mandiri. Untuk mencapai kemandirian keuangan maka pemerintah daerah dapat melakukan berbagai regulasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga penerimaan daerah semakin besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Afarahim. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005-2010. *Thesis*. Universitas Terbuka.
- Anas, M. I. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Solok Selatan (Tahun 2005 Sampai 2018). *Skripsi*. Universitas Andalas.
- Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006–2015). *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 30-39.
- Badan Pusat Statistik (BPS) (2020). Kabupaten Pinrang dalam Angka 2020.
- Bahtiar, A., Muchlis, & Iskandar. (2002). Management Control Systems. Revised Edition. Yogyakarta, Indonesia: UPP AMP YKPN.
- Cahyang, E, Saleh H, Rafiuddin (2017). Analisis Penetapan Sektor Basis Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Bone. *Economics Bosowa*, 3(3), 103-113.
- Gade, M. (1993). Government Accounting. Jakarta, Indonesia: FEUI Publishing Agency.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2007). Akuntansi sektor publik: akuntansi keuangan daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Hutasoit, R. K. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.
- Jalaluddin, 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Universitas Syiah Kuala*, Volume 1, Tahun I, No. 1.
- Kustianingsih, Nurafni, Muslimin Muslimin, and Abdul Kahar. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis* 6(6) : 82–91.
- Laming, R. F., Setiawan, A., & Saleh, H. (2019). The Effect of whistleblowing Hotline, Surprise audit, and the independence of Audit Committee on internal Fraud: Facts of Banking Companies in Indonesia. *International Journal of Advanced Engineering Research and Science*, 6(12).
- Lestari, Anita, Nasrullah Dali, and Muntu Abdullah. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Modal Dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan* 1(2):44–55.
- Republik Indonesia *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Jakarta.

- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.
- Saleh, H., Abubakar, H., & Suriani, S. (2020). Determining Factors Affecting the Interest in Investment in Bulukumba Area of South Sulawesi. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 55(1).
- Santoso, F. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Likuiditas, dan Leverage terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2015-2016. *Skripsi*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sudika, I. K., & Budiarta, I. K. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 21(No 2), 1689–1718.
- Setiawan, A. (2010). “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah”. *Skripsi*. Universitas Negeri Diponegoro. Semarang.
- Susbiyani, A. (2017). The Impact of The Quality of Financial Statements on Local Revenue Using Examination Opinion Results as Moderating Variable. *International Journal of Finance & Banking Studies* (2147-4486), 6(1), 122-133.
- Tuasikal, Askam. (2008).Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Indonesia.*Jurnal Telaah& Riset Akuntansi*,1(2), h:142-155.
- Yani, A. (2004). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wangi, C. A. P. dan I. T. R. (2010). Identification of Factors Causing Late Delays in APBD (Case Study of Rejang Lebong Regency Budget Year 2008-2010). National. Symposium on Accounting XIII Purwekerto. University General Soedirman Purwokerto, Indonesia.

Lampiran ;

Tabel 1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang (2013-2019)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Tingkat Kemakmuran PAD
2013	52,047,346,000	24.68
2014	93,521,199,626	25.26
2015	95,035,256,694	25.28
2016	113,038,054,428	25.45
2017	118,833,000,000	25.50
2018	130,651,000,000	25.59
2019	133,311,000,000	25.62
Rata-Rata Tingkat Kemakmuran PAD		25.34

Sumber : Kabupaten Pinrang Dalam Angka (2020)

Tabel 2. Besarnya Dana Perimbangan Kabupaten Pinrang Tahun 2013-2019

Tahun	Dana Perimbangan (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Ketergantungan Daerah (%)
2013	666,820,196,000	856,676,699,000	77.84
2014	704,993,385,024	996,369,784,854	70.76
2015	853,258,058,555	1,181,473,904,094	72.22
2016	1,025,000,033,024	1,350,102,606,186	75.92
2017	918,761,000,000	2,442,319,070,000	37.62
2018	960,436,000,000	1,282,671,060,000	74.88
2019	972,000,000,000	2,592,871,000,000	37.49

Sumber : Kabupaten Pinrang Dalam Angka, 2020

Tabel 3. Besarnya Kemandirian Keuangan Daerah Pinrang Periode 2013-2019

Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Rasio Kemandirian (%)
2013	52,047,346,000	666,820,196,000	7.81
2014	93,521,199,626	704,993,385,024	13.27
2015	95,035,256,694	853,258,058,555	11.14
2016	113,038,054,428	1,025,000,033,024	11.03
2017	118,833,000,000	918,761,000,000	12.93
2018	130,651,000,000	960,436,000,000	13.60
2019	133,311, 000,000	972, 000,000,000	13.72
Rata-Rata Kemandirian Keuangan Daerah			11.93

Sumber : Hasil Olah Data, 2020

Tabel 4. Besarnya Hasil Olahan Statistik Deskriptif

descriptive statistics					
	N	minimum	maximum	mean	std. deviation
PAD	7	24.68	25.62	25.3400	.32254
D.Perimbangan	7	37.49	77.84	63.8186	18.09110
Kemandirian Keu	7	7.81	13.72	11.9286	2.12905
Valid N (listwise)	7				

Sumber : Hasil Pegolahan Data (SPSS)

Tabel 5. Rangkuman Olahan Regresi Berganda

Regresi	Koefisien	T-hitung	T-tabel	Konstan	Sig
PAD				-126.538	.051
Dana Perimbangan	5.494	3.111	1.895		.036
Keman. Keuangan	-.012	-.375	1.895		.727
R	= 0.887				
Rsquare	= 0.788				
F-hitung	= 7.413				
Sig	= 0.045				
F-tabel	= 4.740				

Sumber : Hasil Pengolahan Data (SPSS)